Nama : Ibnu Abdillah

NIM : 210221052

Kelas : Katar IP21K

Mata Kuliah : Proses legislatif di Indonesia

Etika politik berguna untuk menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur politik yang ada. Adanya penekanan pada korelasi ini menghindarkan pemahaman etika politik yang direduksi menjadi hanya sekedar etika individual dalam bernegara. Sedang tujuan dari adanya etika politik adalah untuk mengarahkan kehidupan politik agar dapat berjalan lebih baik, sehingga dengannya dapat terbangun institusiinstitusi politik yang adil. Landasan berpikir ini lebih didasarkan pada adanya tradisi pemikiran politik yang mengajarkan bahwa etika merupakan sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun secara kolektif. Selain, etika dipahami sebagai landasan normatif meliputi segala perbuatan yang timbul dari perilaku seseorang, sehingga ia menyadari apa yang telah diperbuat.

Dennis F Thompson dalam Political Ethics and Public Office yang dialihbahasakan menjadi Etika Politik Pejabat Negara menulis, setidaktidaknya ada tiga pendekatan untuk mengetahui etika legislatif anggota dewan, yaitu;

Pertama, etika minimalis; Etika ini memerintahkan pelarangan beberapa tindakan yang buruk, semisal korupsi, dengan membuat aturan internal objektif yang berlaku bagi anggota dewan. Contoh penerapan etika minimalis di tubuh dewan adalah dibentuknya aturan tata tertib dan kode etik yang diterbitkan di internal parlemen serta dibentuknya sebuah badan kehormatan.

Kedua, etika fungsionalis; Thompson mencatat, etika fungsionalis menawarkan basis fungsional bagi para legislator. Etika tersebut mendefinisikan tugas bagi anggota dewan dalam lingkup fungsi mereka sebagai wakil rakyat. Anggota dewan harus memahami mengapa mereka dipilih dan untuk apa mereka duduk di kursi dewan perwakilan. Bila hal ini tidak dipahami dengan baik, maka menjadi anggota legislatif lebih diartikan sebagai suatu pekerjaan dan mata pencarian. Tak heran bila kemudian banyak calon anggota legislatif yang mengalami gangguan jiwa karena mengalami kegagalan dalam pemilihan umum. Seharusnya anggota dewan mampu menempatkan diri bahwa menjadi legislator adalah amanah, bukan pekerjaan. Jika ditempatkan sebagai pekerjaan, tentunya mereka akan bekerja kepada siapa saja yang mampu membayar tinggi. Akibatnya, mudah sekali uang korupsi yang berupa sumbangan, bantuan, atau lainnya yang masuk ke kantong anggota dewan.

Ketiga, etika rasionalis; Fondasi rasional menyadarkan para legislator bahwa mereka harus bertugas pada prinsip-prinsip hakiki politik, seperti keadilan, kebebasan, atau kebaikan bersama *(bonum commune).* Berdasarkan pendekatan etika rasionalis, maka anggota legislatif dilarang melakukan tindakan memperkaya diri dengan melawan hukum, baik atas nama kepentingan pribadi, golongan, maupun partainya. Saat anggota dewan telah duduk di kursi parlemen, maka atasan mereka bukan lagi partai, bukan pula petinggi partai, melainkan rakyat dan konstituen.

Atas dasar tiga pendekatan tadi, maka segala kebijakan yang memberikan ruang kemudahan bagi anggota dewan melakukan pelanggaran hendaknya dapat ditinjau ulang. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga sikap etis anggota dewan. Meminimalisasi segala perilaku dan kebijakan yang tidak familiar di mata masyarakat. Anggota dewan dalam dunia politik hendaknya mampu menjadi cerdik seperti ular, namun etika menjadikannya seperti merpati yang tulus. Artinya dua sikap politik yang selalu berdampingan dalam satu pribadi seseorang. Hal ini sebagaimana pendapat Immanuel Kant yang mengatakan bahwa ular dan merpati dapat hidup berdampingan dan walau pun selanjutnya merpatilah yang akan menang. Namun seorang filsuf mengatakan lain “ular dan merpati akan berbaring bersama, tetapi merpati akan sulit untuk tidur.”

Etika legislatif dapat juga dilakukan jika tuntutan-tuntutannya diinterprestasikan dalam konteks proses legislator. Tuntutan-tuntutan itu membatasi perilaku legislator, tetapi tidak dengan cara mencegah mereka menjalankan peran mereka sebagai wakil rakyat. Artinya tuntutan yang memberikan tuntunan agar anggota dewan dapat berperilaku terhormat sebagai wakil rakyat di parlemen.

Pelanggaran etika kaum elit banyak terjadi di wilayah legislatif, karena di area politik tersebut banyak menyangkut kepentingan dari sekelompok orang maupun partai, meskipun seseorang atau kelompok partai memperjuangkan suatu kebenaran atau keadilan. Para legislator menghadapi konflik antara kewajiban demi kebaikan orang-orang tertentu (kolega, partai) dan kewajiban demi kebaikan publik atau konstituennya. Dibandingkan dengan para administrator dan pejabat eksekutif, para legislator menikmati lebih banyak independensi dari kolega mereka. Para legislator sama sekali tidak bisa membuat keputusan (UU) tanpa kerja sama kolega mereka. Hubungan mereka lebih kolegial daripada hubungan hirarkis yang biasa ada di eksekutif.